



**LAPORAN EVALUASI INTERNAL
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TRIWULAN IV
TAHUN 2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Januari 2026, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos
NRP : 70060445
Jabatan : Deputi Bidang Penindakan

2. Nama : Irwan, S.Si., Apt., MKM.
NIP : 19700615 199903 1 002
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penindakan

3. Nama : Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.
NIP : 19810304 200312 1 001
Jabatan : Ketua Tim SAKIP Deputi Penindakan

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Deputi Bidang Penindakan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja dan Anggaran per Output

No	Rincian Output	Volume							Anggaran							
		Target	B10	%	B11	%	B12	%	Pagu (Ribuan)	*)Pagu Revisi (Ribuan)	B10 (Ribuan)	%	B11 (Ribuan)	%	B12 (Ribuan)	%
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	4	100	4	100	4	100	450.861	167.202	164.242	98	164.942	98	167.100	99
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	21	6	28,57	6	28,57	8	38,10	5.266.445	2.216.209	1.226.022	55	1.491.540	67	2.216.176	100
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	4	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Sarana Penindakan Obat dan Makanan	15	13	86,67	15	100	15	100	330.440	314.930	23.275	7	23.275	7	314.408	99
5	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	97	19	19,59	44	45,36	97	100	356.893	356.893	288.300	80	354.860	99	356.885	100
6	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	14	3	21,43	4	28,57	5	35,71	2.969.620	780.181	654.004	83	699.865	89	780.173	100

No	Rincian Output	Volume							Anggaran							
		Target	B10	%	B11	%	B12	%	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	B10 (Ribu)	%	B11 (Ribu)	%	B12 (Ribu)	%
7	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	6	0	0	0	0	1	16,67	2.219.829	725.181	0	0	47.816	6	725.172	100
8	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	20	9	45	10	50	10	50	1.449.699	543.287	484.651	89	523.287	96	543.250	99
9	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	5	100	5	100	5	100	4.761.234	1.888.677	1.830.854	96	1.858.455	98	1.882.357	99
10	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	8	47,06	8	47,06	13	76,47	2.105.033	1.144.390	362.614	31	430.120	37	1.123.452	98
11	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	17	8	47,06	8	47,06	9	52,94	6.548.332	2.740.749	1.584.759	57	2.606.331	95	2.740.595	99

No	Rincian Output	Volume							Anggaran							
		Target	B10	%	B11	%	B12	%	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	B10 (Ribu)	%	B11 (Ribu)	%	B12 (Ribu)	%
12	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	4	3	75	3	75	4	100	17.484.353	17.000.000	16.885.999	99	16.885.999	99	16.995.699	99
TOTAL									47.442.739	27.877.698	23.504.724	84	25.086.494	89	27.845.271	99

*) Pagu Revisi = Pagu Awal – Blokir

B. Capaian Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran				Kendala/Hambatan
		Target	Realisasi s.d. TW IV	Capaian %	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi s.d. TW IV (Ribu)	Capaian %	
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	4	100	450.861	167.202	167.100	99	Tidak Ada Kendala
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	21	8	38,10	5.266.445	2.216.209	2.216.176	100	Tidak Ada Kendala catatan : terdapat efisien atau pemblokiran anggaran dengan tidak merubah target volume sehingga capaian anggaran tidak sebanding dengan capaian volume
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	4	0	0	3.500.000	0	0	0	Seluruh anggaran terblokir
4	Sarana Penindakan Obat dan Makanan	15	15	100	330.440	314.930	314.408	99	Tidak Ada Kendala
5	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	97	97	100	356.893	356.893	356.885	100	Tidak Ada Kendala

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran				Kendala/Hambatan
		Target	Realisasi s.d. TW IV	Capaian %	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi s.d. TW IV (Ribu)	Capaian %	
6	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	14	5	35,71	2.969.620	780.181	780.173	100	Tidak Ada Kendala catatan : terdapat efisien atau pemblokiran anggaran dengan tidak merubah target volume sehingga capaian anggaran tidak sebanding dengan capaian volume
7	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	6	1	16,67	2.219.829	725.181	725.172	100	Tidak Ada Kendala catatan : terdapat efisien atau pemblokiran anggaran dengan tidak merubah target volume sehingga capaian anggaran tidak sebanding dengan capaian volume
8	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	20	10	50	1.449.699	543.287	543.250	99	Tidak Ada Kendala catatan : terdapat

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran				Kendala/Hambatan
		Target	Realisasi s.d. TW IV	Capaian %	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi s.d. TW IV (Ribu)	Capaian %	
									efisien atau pemblokiran anggaran dengan tidak merubah target volume sehingga capaian anggaran tidak sebanding dengan capaian volume
9	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	5	100	4.761.234	1.888.677	1.882.357	99	Tidak Ada Kendala catatan : terdapat efisiensi atau pemblokiran anggaran namun disiasati dengan penyesuaian lingkup wilayah operasi sehingga volume target awal terpenuhi
10	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	13	76,47	2.105.033	1.144.390	1.123.452	98	Tidak Ada Kendala catatan : terdapat efisien atau pemblokiran anggaran

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran				Kendala/Hambatan
		Target	Realisasi s.d. TW IV	Capaian %	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi s.d. TW IV (Ribu)	Capaian %	
									dengan tidak merubah target volume sehingga capaian anggaran tidak sebanding dengan capaian volume
11	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	17	9	52,95	6.548.332	2.740.749	2.740.595	99	Tidak Ada Kendala catatan : terdapat efisien atau pemblokiran anggaran dengan tidak merubah target volume sehingga capaian anggaran tidak sebanding dengan capaian volume
12	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	4	4	100	17.484.353	17.000.000	16.995.699	99	Tidak Ada Kendala

*) Pagu Revisi = Pagu Awal – Blokir

C. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran

1. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Oktober

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B10	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	68,9	65	106	74	93,11	74	93,11	3.033.067	2.193.469	72,32
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	76,11	75	101,47	75	101,47	75	101,47	24.005.606	20.835.437	86,79
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	85,65	0	85,65	0	211.703	120.149,7	56,75
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	76	0	76	0	201.456	110.480	54,84
		Nilai Kinerja Anggaran	0	0	0	5	0	5	0	199.176	108.838	54,64

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B10	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
		Deputi Bidang Penindakan										
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	3	0	3	0	226.688	136.349	60,15
TOTAL										27.877.698	25.086.494	84,31

*) Target sementara Renstra sebelum ditetapkan

2. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan November

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B11	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	68,9	65	106	74	93,11	74	93,11	3.033.067	3.005.809	75,45

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B11	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	74,85	70	106,93	75	99,80	75	99,80	24.005.606	24.001.067	92,71
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	85,65	0	85,65	0	211.703	211.509	64,70
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	76	0	76	0	201.456	201.285	63,19
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	5	0	5	0	199.176	199.043	63,09
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	3	0	3	0	226.688	226.555	67,57
TOTAL										27.877.698	25.086.494	89,99

*) Target sementara Renstra sebelum ditetapkan

3. Capaian Rencana Aksi Perjanjian dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Desember

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B12	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	87,10	74	117,7	74	117,7	74	117,7	3.033.067	3.005.809	99,10
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	77,11	75	102,81	75	102,81	75	102,81	24.005.606	24.01.067	99,98
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yangnPrima	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	86,14	85,65	100,58	85,65	100,65	85,65	100,65	211.703	211.509	99,91
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	74,92	76	98,58	76	98,58	76	98,58	201.456	201.285	99,92

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B12	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	3*	5	60	5	60	5	60	199.176	199.043	99,93
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	2,906	3	96,87	3	96,87	3	96,87	226.688	226.555	99,94
TOTAL										27.877.698	27.845.271	99,88

*) Target sementara Renstra sebelum ditetapkan

D. Hasil Tinjau Manajemen

Telah dilakukan konsolidasi dan tinjauan manajemen Deputi Bidang Penindakan pada tanggal 12 Januari 2026 melibatkan seluruh pimpinan tinggi pratama dan ASN di lingkungan Deputi Bidang Penindakan dipimpin oleh Bapak Deputi Bidang Penindakan.

1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	% Capaian
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74	87,10	117,70%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	% Capaian
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75	77,11	102,81%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan	85,65	86,14	100,57
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	76	74,92	98,58
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	5	3*	60*
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3,00	2,906	96,87

*Nilai Realisasi bersifat sementara

2. Pending Issue (Internal dan Eksternal)
 - a. Penurunan nilai SAKIP Deputy Penindakan Tahun 2025
 - b. Perlunya penyesuaian terhadap target indikator program 2026 karena realisasi 2025 sdh melebihi target 2026
 - c. Penyesuaian target output dan kegiatan akibat adanya pemotongan anggaran.
 - d. Belum adanya anggaran belanja modal untuk kebutuhan sarpras pegawai baru
 - e. Pedoman pelaksanaan Cegah Tangkal mengalami pembaharuan
 - f. Sosialisasi penerapan KUHP dan KUHAP baru ke seluruh UPT

- g. Belum adanya anggaran untuk pelaksanaan Diklat Intelijen Dasar TA 2026 yang sebelumnya telah masuk dalam kegiatan terpadu akibat adanya pemotongan anggaran
 - h. Perpanjangan masa lisensi perangkat forensik digital yang akan habis di tahun 2026
3. Peluang Peningkatan dan Kebutuhan Perubahan Sistem Manajemen
- a. Berkoordinasi dengan Inspektorat Utama dan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait upaya peningkatan nilai SAKIP periode berikutnya termasuk melakukan revaluasi penetapan target sasaran kinerja Tahun 2026 mengingat realisasi Tahun 2025 jauh melebihi target yang ditetapkan
 - b. Melakukan monitoring terhadap perkembangan kebijakan prioritas berdasarkan direktif presiden yang berimplikasi kepada efisiensi/pemblokiran anggaran
 - c. Direktorat Cegah Tangkal agar melakukan pembahasan dan penguraian kembali terkait alat ukur kinerja dari penambahan kegiatan berdasarkan pedoman pelaksanaan cegah tangkal terbaru.
 - d. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan agar melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai terkait intelijen secara formal bagi pegawai di pusat dan UPT. Oleh karena itu perlu dipertajam kembali dan koordinasi dengan UPT terkait dengan anggaran pelaksanaannya.
 - e. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan agar melakukan pengkajian kembali terhadap tolok ukur keberhasilan, mengingat masih terdapat perkara carry over yang telah berlangsung cukup lama. Terhadap perkara-perkara tersebut, perlu diberikan kepastian hukum. Apabila terdapat potensi untuk dilanjutkan, agar segera ditindaklanjuti dan dituntaskan.
 - f. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan agar melakukan sosialisasi penerapan KUHP dan KUHPA baru kepada seluruh UPT
 - g. Direktorat Siber Obat dan Makanan agar mengoptimalkan pemanfaatan perangkat inawebcrawler yang baru diadakan dalam mendukung kegiatan patroli siber. Dilakukan pula optimasi dukungan pelaksanaan kegiatan siber di UPT.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Januari 2026

Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan,



Dewa Gede Baru Rastika, S.Sr., Apt., M.E
NIP. 198103042003121001

Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penindakan,



Irwan, S.Si., Apt., MKM.
NIP. 197006151999031002

Deputi Bidang Penindakan,



Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos.
NRP. 70060445

Lampiran a. Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Triwulan IV Tahun 2025

I. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

➤ Definisi Operasional :

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
(Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap II x 1) / Jumlah Target Perkara x 100%)
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani siterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara *carryover* yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carryover* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

➤ Cara Perhitungan

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

(Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap II)

➤ Perhitungan Realisasi:

Tahapan	Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over			
SPDP	199	96	13	6	0.15	2.85	87.10
Tahap I			23	12	0.55	19.25	
P21			19	22	0.85	34.85	
Tahap II			144	56	1	200	
Total	199	96	199	96			

II. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

➤ Definisi Operasional :

Kegiatan Deteksi mencakup pelaksanaan dari kegiatan Siber, Cegah Tangkal dan Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi antara lain:

1. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang berisi informasi seluruh hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindak lanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber sediaan farmasi an makanan, dan analisis digital forensik sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh oemangku kepentingan sesuai denga rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.

2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan makanan, berupa : penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.
3. Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang disarankan. Rekomendasi intelijen yang berkualitas dihitung melalui survey kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.

➤ Cara Perhitungan :

- a. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan
- b. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti
- c. Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti

Rumus : $\frac{a+b+c}{3} \times 100\%$

➤ Perhitungan Realisasi :

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Persentase Rekomendasi Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	0	0	85,04	85,04	85,04	90,88	85,46	85,46	85,58	85,58	85,58	89,11
Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	32,43	32,43	35,14	51,28	53,85	58,97	62,22
Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti	0	0	66,67	66,67	66,67	71,43	71,43	87,50	88,89	88,89	80	80

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	0	0	50,57	50,57	50,57	64,91	63,11	69,37	75,25	76,11	74,85	77,11

III. Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional :

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance* menuju BPOM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- c. Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - 1) Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 - 2) Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

➤ Cara Perhitungan :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assesment* dan revidi oleh auditor internal serta Tim NoPenilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen, yaitu:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8 %
2	Penataan Tatalaksana	7 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10 %
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,5 %

➤ Perhitungan Realisasi

UNIT KERJA	NILAI ZI
Direktorat Cegah Tangkal	89,12
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	84,65
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	87,22
Direktorat Siber Obat dan Makanan	83,58
Nilai ZI Deputi Bidang Penindakan	86,14

IV. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

➤ Cara Perhitungan

Penjumlahan 4 (empat) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja;
- 4) Evaluasi Kinerja Internal;

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	25
Nilai Evaluasi		100

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak
7	D	>0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

➤ Perhitungan Realisasi

No	Komponen	Bobot	Nilai 2025	Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
1.	Perencanaan Kinerja	24	17,76	0,00
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,48	+1,20
3.	Pelaporan Kinerja	12	8,64	-0,36
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	16,20	-0,60
5.	Capaian Kinerja	20	13,84	-1,17
Nilai Hasil Evaluasi			75,85	74,92
Predikat			BB	BB

V. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional

- Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- 8 (delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - Revisi DIPA (bobot 10%)
 - Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 - Belanja Kontraktual (bobot 10%)

- 5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 - 6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 - 7) Capaian Output (bobot 25%)
 - 8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)
- Cara Perhitungan:
- Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
- Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

- Perhitungan Realisasi:

Nilai	Tahun 2025
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,57
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	62,49
Nilai Kinerja Anggaran	78,03
Nilai Konversi	3*
Kategori	Cukup

VI. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

- Definisi Operasional:
- a. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko

- b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
- c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

- d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
 - 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
 - 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
 - 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

➤ Cara Perhitungan:

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

➤ Perhitungan Realisasi:

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PI.06.07.71.7.01.26.02 tanggal 02 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025, diperoleh hasil Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

Nilai	Tahun 2025
Total Nilai Maturitas	46,50
Indeks Nilai Maturitas	2,906
Tingkat Maturitas	<i>Risk Aware</i>

Lampiran b.

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TW IV

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 09.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Batik Lantai 3
Pimpinan Rapat : Ketua Tim Sakip Deputy Bidang Penindakan
Peserta Rapat : Tim Sakip Deputy Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Pembahasan terkait laporan evaluasi internal TW IV
2. Pembahasan terkait penyusunan laporan kinerja tahunan

III. Hasil Pembahasan Rapat

a. Pembukaan dan Arahan dari Ketua Tim Sakip Deputy Bidang Penindakan

1. Sehubungan telah berakhirnya periode triwulan IV, mengingatkan batas waktu pelaporan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM yaitu tanggal 15 Januari 2026 untuk Berita Acara Laporan Evaluasi Internal TW IV dan 20 Februari 2026 Untuk Laporan Kinerja Tahun 2025.
2. Batas penginputan data kinerja dan anggaran pada link bit.ly/Monev_Dep4_2025 paling lambat jumat, 09 Januari 2026 untuk selanjutnya diinput dalam laporan evaluasi internal.
3. Sebelum laporan evaluasi internal ditetapkan agar diagendakan pembahasan dengan Bapak Deputy dan para Direktur terlebih dahulu untuk meminta arahan dan masukan untuk perbaikan kedepan.
4. Untuk beberapa nilai kinerja indikator tahun 2026 pada sasaran kinerja "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal" agar dikomunikasikan ke unit pengampu

IV. Dokumentasi



NOTULEN RAPAT KONSOLIDASI DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Waktu : 09.00 - selesai
Tempat : Auditorium Lt. 8 Gedung Merah Putih
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan
Peserta Rapat : 1. Eselon 2 di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan
2. Kepala Pusat Data dan Informasi
3. Seluruh Pegawai Deputi Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Capaian Anggaran, Output, dan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025
2. Pagu Anggaran, Target Output, dan Target Kinerja Tahun 2026
3. Pending Issue Tiap Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan
4. Plan of Action (PoA) Tahun 2026 Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan

III. Hasil Pembahasan Rapat

1. Arahan oleh Deputi IV

A. Arahan Umum

- a. Menyampaikan bahwa tujuan dari rapat konsolidasi ini untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait apa yang sudah dikerjakan, pencapaian target, kelebihan dan kekurangan.
- b. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan apa yang sudah dikerjakan semua pada tahun 2025 ini, telah mencapai target ditengah keterbatasan.
- c. Serapan anggaran Deputi IV pada tahun 2025 yaitu sebesar 99,88%. Anggaran pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan drastis. Tetapi pada tahun 2026 angkanya masih lebih baik daripada tahun 2025.
- d. Capaian kinerja Deputi Penindakan rata-rata sudah mencapai target. Akan tetapi terdapat indicator yang tidak mencapai target yaitu Nilai AKIP dan Indeks Manajemen Risiko. Hal ini perlu dilakukan breakdown untuk mencari penyebab dan melakukan intervensi jika diperlukan.

- e. Target kinerja Deputy IV pada Tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun 2025. Mohon dapat dilakukan monitoring setiap triwulan untuk memastikan target dapat tercapai.
- f. Pending Issue Deputy Penindakan yaitu mengenai Penurunan Nilai AKIP dan Perlunya penyesuaian terhadap target indikator program 2026 karena realisasi 2025 sudah melebihi target 2026.
- g. DIPA 2026 terkena penajaman prioritas Presiden secara umum kurang lebih sekitar 40% dari DIPA awal. Oleh karena itu, mohon kepada seluruh Direktorat untuk nanti Menyusun program-program yang mendukung prioritas Presiden agar anggaran yang terkena penajaman tersebut dapat dibuka untuk menunjang pencapaian target Deputy IV.
- h. Mohon untuk POA dapat dipatuhi dan segera dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan kita menggunakan anggaran dari negara, mohon untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
- i. Memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pusat Data dan Informasi yang telah mendukung kegiatan-kegiatan di Kedeputan IV, kedepannya kita akan bekerja sama dengan lebih baik lagi

B. Arahan terkait Pending Issue

- a. Menyampaikan isu sentral yaitu penurunan nilai AKIP, dan perlu melakukan pembahasan selanjutnya untuk mengetahui penyebab penurunannya. Serta melakukan koordinasi dengan Inspektorat Utama dan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait upaya peningkatan nilai SAKIP periode berikutnya termasuk melakukan revaluasi penetapan target sasaran kinerja Tahun 2026 mengingat realisasi Tahun 2025 jauh melebihi target yang ditetapkan.
- b. Menyampaikan agar melakukan monitoring terhadap perkembangan kebijakan prioritas berdasarkan direktif presiden yang berimplikasi kepada efisiensi/pemblokiran anggaran.
- c. Menyampaikan kepada Direktorat Cegah Tangkal agar melakukan pembahasan dan harus diurai kembali terkait alat

ukur kinerja dari penambahan kegiatan berdasarkan pedoman pelaksanaan Cegah Tangkal terbaru.

- d. Menyampaikan kepada Direktorat Intelijen agar melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai terkait intelijen secara formal bagi pegawai di pusat dan UPT. Oleh karena itu perlu dipertajam kembali dan koordinasi dengan UPT terkait dengan anggaran pelaksanaannya.
- e. Menyampaikan kepada Direktorat Penyidikan agar melakukan pengkajian kembali terhadap tolak ukur keberhasilan, mengingat masih terdapat perkara carry over yang telah berlangsung cukup lama. Terhadap perkara-perkara tersebut, perlu diberikan kepastian hukum. Apabila terdapat potensi untuk dilanjutkan, agar segera ditindaklanjuti dan dituntaskan. Serta agar melakukan sosialisasi penerapan KUHP dan KUHPA baru kepada seluruh UPT.
- f. Menyampaikan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan agar mengoptimalkan pemanfaatan perangkat *inawebcrawler* yang baru diadakan dalam mendukung kegiatan patroli siber. Dilakukan pula optimasi dukungan pelaksanaan kegiatan siber di UPT.

2. Paparan oleh KPA Deputy Bidang Penindakan dan Direktur Cegah Tangkal

- a. Serapan anggaran pada tahun 2025 yaitu sebesar 99,88% dan tahun 2024 yaitu sebesar 99,98%. Ada pengurangan capaian serapan anggaran dibandingkan tahun 2024, hal ini terjadi karena pada akhir tahun 2025 terjadi tambahan anggaran sehingga mungkin beberapa belum bisa dipertanggungjawabkan.
- b. Mengharapkan agar sering melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran, dan apabila terdapat selisih agar segera dilakukan revisi, sehingga diharapkan serapan anggaran di tahun 2026 dapat 100%.
- c. Mengharapkan masing-masing Direktorat agar menyiapkan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas Presiden seperti yang berkaitan dengan MBG dan penuntasan TBC. Kemudian akan diusulkan dan jika justifikasi kuat dan memiliki urgensi, maka diharapkan anggaran terblokir sebesar Rp 8.847.326.000 dapat diperoleh kembali.

- d. Terkait Direktorat Cegah Tangkal terdapat Indikator yang belum mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun 2024 yaitu Indeks Manajemen Risiko, hal ini perlu kita perbaiki.
- e. Direktorat Cegah Tangkal mendapat pemotongan anggaran sekitar 45%. Namun Direktorat Cegah Tangkal akan tetap melakukan kegiatan dengan anggaran yang tersedia yaitu sekitar 55%. Untuk mendapatkan kembali anggaran sekitar 45%, pertama Direktorat Cegah Tangkal akan mengusulkan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas Presiden, dan melanjutkan kegiatan tahun 2025 yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- f. Pending Issue terbesar di Direktorat Cegah Tangkal yaitu terjadinya perubahan pelaksanaan Cegah Tangkal dalam Pedoman Cegah Tangkal. Terdapat penambahan kegiatan Cegah Tangkal yaitu Operasi Cegah Tangkal, Kampanye Cegah Tangkal, dan Layanan Cegah Tangkal.
- g. Terkait kegiatan Operasi Cegah Tangkal, kami berharap Direktorat di Deputi Penindakan dapat berbagi informasi sehingga kegiatan Operasi Cegah Tangkal dapat berjalan.
- h. POA Direktorat Cegah Tangkal memfokuskan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan MBG dan penuntasan TBC untuk dapat diselesaikan sebelum TW IV. Serta untuk kegiatan yang berfokus pada MBG dan penuntasan TBC akan dilaksanakan pada TW IV dengan catatan anggaran blokir ini belum didapatkan di awal tahun.

3. Paparan oleh Direktur Intelijen Obat dan Makanan

- a. Realisasi serapan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan terealisasi dengan baik yaitu 100%.
- b. Capaian Kinerja tahun 2025 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan yaitu pada Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Indeks Manajemen Risiko mengalami penurunan namun nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024.

- c. Menyampaikan pending issue yaitu perlu sarana dan prasarana bagi pegawai baru. Serta tengah mengupayakan melaksanakan Diklat dan sedang mengkaji mekanismenya.
- d. Memohon kepada Kepala Pusat Data dan Informasi untuk menuntaskan pengembangan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Serta berharap agar kedepannya ADP bisa lebih mutakhir dan keamanannya bisa meningkat.

4. Paparan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan

- a. Tahun 2026 terkait anggaran Direktorat Siber mendapatkan pengurangan anggaran lebih kecil dari direktorat lain. Pengurangan terbesar yaitu pada lisensi forensik.
- b. Terdapat indikator yang belum mencapai target namun mengalami peningkatan dari tahun 2024 yaitu Indeks Manajemen Risiko.
- c. Menyampaikan POA Direktorat Siber TW I hingga TW IV.
- d. Terdapat pelatihan investigasi Siber bagi pegawai-pegawai di Deputi IV dan juga kepada pegawai di UPT. Biaya ditanggung masing-masing.

5. Paparan oleh Direktur

- a. Menyampaikan bahwa sasaran strategis “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan” memiliki pencapaian lebih dari 110%. Serta terkait dengan indikator Nilai Pembangunan ZI tidak mencapai target.
- b. Menyampaikan pending issue terkait sosialisasi penerapan KUHP dan KUHPA baru ke seluruh UPT, melakukan revisi Peraturan terkait Pengelolaan Barang Bukti sesuai dengan rekomendasi dari BPK, perpanjangan MoU/PKS dengan Polri yang akan habis masa berlakunya pada tahun 2026.

6. Paparan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi

- a. Menyampaikan bahwa sebagai supporting seluruh unit kerja, Pusdatin akan memberikan prioritas dan lebih baik lagi akan kebutuhan Deputi IV.
- b. Menyampaikan bahwa kita harus sama-sama meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, terlebih terkait dengan kebutuhan ADP kedepannya

IV. Dokumentasi



LAMPIRAN MATRIKS RENCANA AKSI ATAS CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	4	100	Tidak ada kendala. Efisiensi anggaran tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian volume. Diharapkan pada akhir tahun volume tercapai sesuai target	Memonitoring update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.	Telah dilakukan monitoring informasi mengenai kebijakan efisien anggaran, telah tersusun 4		

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	21	8	38,10	Pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan rekomendasi mengalami keterbatasan akibat efisiensi anggaran.	Meningkatkan sinergi dengan unit kerja lain di lingkungan BPOM maupun di luar instansi untuk berbagi data dan informasi terkait	Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor lain sehingga data dan informasi		

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kejahatan obat dan makanan	yang dibutuhkan telah terpenuhi untuk penyusunan rekomendasi		
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	4	0	0	anggaran terblokir 100% sehingga tidak ada realisasi	memonitoring update informasi mengenai kebijakan efisiensi	Telah dilakukan monitoring dan diketahui pada akhir tahun		

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							anggaran RO ini tetap terblokir 100%		
4	Sarana Penindakan Obat dan Makanan	15	15	100	Tidak ada kendala, akan berproses di TW IV	Segera mempersiapkan proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin	Proses pengadaan belanja modal dan mesin Deputi Penindakan telah 100%		

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	97	97	100	Tidak ada kendala, akan berproses di TW IV	Segera mempersiapkan proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin	Proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin Deputi Penindakan telah dilakukan 100%		
6	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	14	5	35,71	Terdapat efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih	Kegiatan yang tidak terblokir telah		

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berdampak pada kemungkinan realisasi volume yang tidak mencapai target di akhir tahun	terdapat anggaran	dilaksanakan		
7	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	6	1	16,67	Anggaran terblokir 100% sehingga tidak ada realisasi	memonitoring update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.	Telah dilakukan monitoring informasi mengenai		

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kebijakan anggaran dan terdapat pembukaan blokir sebagian dengan volume 1 dokumen		
8	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	20	10	50	Adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pembatasan perjalanan dinas	Menentukan prioritas kasus yang akan ditindaklanjuti	Telah dilaksanakan kegiatan/ operasi		

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					sehingga lokus kegiatan / operasi intelijen terbatas.	dengan mempertimbangan ketersediaan anggaran	intelijen dengan mempertimbangan lingkup wilayah operasi		
9	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	5	100	Tidak ada kendala	Penyelesaian berkas perkara sampai dengan Tahap II	Penyelesaian berkas perkara sampai dengan Tahap II	-	-

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	13	76,47	Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan penindakan terbatas	Intensifikasi operasi penindakan dalam rangka optimalisasi penyidikan kejahatan obat dan makanan	Telah dilakukan 13 operasi penindakan sebagai bentuk optimalisasi penyidikan dengan adanya penyesuaian kebijakan efisiensi		

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							anggaran dengan mempertim- bangan cakupan wilayah operasi		
11	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	17	9	52,95	Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemberian layanan Direktorat Siber Obat dan	Mengupayakan layanan prima dan terus meningkatkan sinergitas pada setiap stakeholder dengan	Telah dihasilkan 9 rekomendasi analisis siber sebagai bentuk		

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Makanan kepada stakeholder terkait	memperhatikan ketentuan dan update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran	layanan yang diberikan Direktorat Siber kepada stakeholder terkait		
12	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	4	4	100	Tidak ada Kendala	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin akan diselesaikan pada akhir triwulan III	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin telah dilakukan 100% dalam		

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan atau TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							mendukung tercapainya output Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber		

LAMPIRAN MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III TAHUN 202

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Realisasi telah mencapai target Triwulan yang ditetapkan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi	Akhir tahun	Telah dilakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga realisasi melebihi target yang ditetapkan	-	-	Target Tercapai
2	Persentase Rekomendasi	Realisasi telah mencapai target	Melakukan monitoring	Akhir tahun	Telah dilakukan monitoring	-	-	Target Tercapai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahanyang Optimal	Triwulan yang ditetapkan	terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi		terhadap kegiatan / program sehingga realisasi melebihi target yang ditetapkan			
3	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun,sehingga tidak ada target	Melakukan monitoring terhadap kegiatan/ program sehingga pencapaian target	Akhir tahun	Telah dilakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga			Target Tercapai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang ditetapkan setiap Triwulan	di akhir tahun dapat terpenuhi		realisasi melebihi target yang ditetapkan			
4	Nilai AKIP Deputi Budang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhir tahun	Telah dilakukan monitoring terhadap kegiatan / program meskipun realisasi belum mencapai target yang sudah			Target Tidak Tercapai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ditetapkan			
5	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhi tahun	Telah dilakukan monitoring terhadap kegiatan / program meskipun realisasi belum mencapai target yang sudah ditetapkan			Target Tidak Tercapai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan/ program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhir tahun	Telah dilakukan monitoring terhadap kegiatan / program meskipun realisasi belum mencapai target yang sudah ditetapkan			Target Tidak Tercapai